

**EDISI 10
FEBRUARI
2026**



Salam Redaksi

Edisi kesepuluh Bulletin Ideologi ini menghadirkan satu tema yang krusial sekaligus strategis: bagaimana memaknai inklusivitas tanpa kehilangan keteguhan manhaj. Di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, istilah “inklusif” kerap dipahami secara dangkal—bahkan kadang diseret menjadi kompromi nilai. Tulisan Dr. H. Mulyanto, M.Eng. mengajak kita menempatkan inklusivitas pada kerangka yang proporsional: sebagai ekspresi dari Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn, bukan sebagai relativisme yang mengaburkan prinsip.

Paradigma ini menjadi penting bagi PKS dalam merawat keseimbangan antara keterbukaan dakwah dan keteguhan pembinaan. Inklusif dalam menjangkau, selektif dalam membina; terbuka dalam berinteraksi, kokoh dalam akidah dan manhaj. Di sinilah dakwah menemukan relevansinya bagi Indonesia yang majemuk—menjadi jembatan, bukan sekat; menjadi solusi, bukan sumber polarisasi. Edisi ini mengajak pembaca memahami bahwa keteguhan prinsip dan keluasan rahmat bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sayap yang menguatkan arah perjuangan.

Selamat Membaca...



MPP PKS

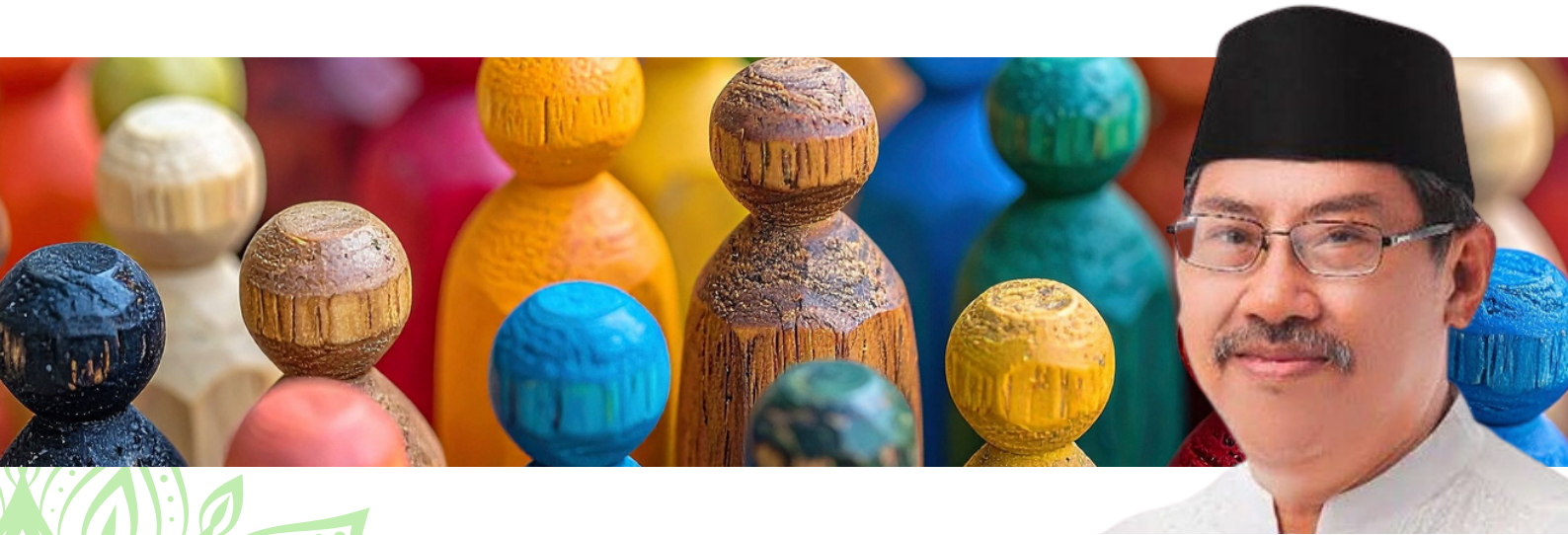
eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



Paradigma Inklusivitas PKS: Antara *Rahmatan lil 'Ālamīn* dan Keteguhan *Manhaj*

Dr.H. Mulyanto, M.Eng.
Ketua MPP PKS

Pendahuluan

Inklusivitas merupakan konsep yang semakin relevan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan keberagaman masyarakat modern. Secara etimologis, inklusif berasal dari kata inclusive yang bermakna “mencakup” atau “mengikutsertakan”.

Secara konseptual, inklusivitas menunjuk pada sikap terbuka untuk memahami realitas dan persoalan dari sudut pandang orang lain, serta kesediaan untuk hidup dan bekerja bersama di tengah perbedaan latar belakang, identitas, dan kondisi sosial.

Dalam konteks dakwah PKS, inklusivitas bukan sekadar pilihan metodologis,

melainkan konsekuensi logis dari hakikat dakwah itu sendiri. Dakwah adalah amanah ilahiyah yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ia bukan milik kelompok tertentu, bukan hak eksklusif satu jamaah, dan tidak boleh disempitkan menjadi simbol identitas kelompok semata.

Dakwah adalah risalah Allah SWT untuk membimbing manusia menuju kebaikan, keadilan, dan kemuliaan hidup.

Oleh karena itu, dakwah pada dasarnya bersifat inklusif. Dakwah hadir untuk merangkul, membangun jembatan kemanusiaan, dan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, terlebih dalam konteks Indonesia yang majemuk secara etnis, budaya, dan agama.

Islam sebagai Rahmatan lil 'Ālamīn

Rasulullah SAW diutus bukan untuk satu kelompok, satu suku, atau satu lapisan sosial tertentu, melainkan untuk seluruh manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmatan lil 'ālamīn. Konsekuensinya, dakwah Islam tidak boleh terkurung dalam lingkaran sempit eksklusivisme kelompok, apalagi merasa cukup dengan pengikut sendiri.

Paradigma PKS sebagai Partai Islam yang rahmatan lil 'ālamīn menuntut kita untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan yang memanusiakan, bukan menakutkan; membimbing, bukan menghakimi; serta menyatukan, bukan memecah belah. Karena, setiap bentuk dakwah yang menjauhkan Islam dari nilai kemanusiaan, sejatinya telah menanggalkan ruh risalah kenabian.

Namun, inklusivitas dakwah tidak boleh disalahpahami sebagai pengaburan kebenaran atau relativisme nilai. Inklusivitas bukan berarti mengorbankan prinsip akidah atau melemahkan komitmen ideologis. Inklusivitas adalah cara menyampaikan kebenaran dengan hikmah, empati, dan pemahaman yang mendalam atas realitas manusia.

Sebaliknya, dakwah yang eksklusif—yang merasa paling benar sendiri dan menutup diri dari masyarakat—sering



kali justru mengerdilkan Islam di mata publik. Islam tampak jauh, keras, dan tidak relevan dengan problem kehidupan nyata.

Almarhum KH. Hilmi Aminuddin, sesepuh PKS, (semoga Allah SWT tempatkan di sisi-Nya yang mulia) pernah menegaskan bahwa:

"Dakwah Islam tidak boleh terjebak dalam eksklusivisme kelompok, tetapi harus hadir sebagai kekuatan pemersatu umat dan bangsa."

Pernyataan ini menjadi fondasi penting bagi dakwah yang berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan.

Teladan Rasulullah dan Dakwah Inklusif

Sirah Nabi Muhammad SAW menunjukkan praktik dakwah yang sangat inklusif. Rasulullah berdialog dengan non-Muslim, melindungi minoritas, menghormati perjanjian, dan melayani semua golongan tanpa

Dakwah Islam tidak boleh terjebak dalam eksklusivisme kelompok, tetapi harus hadir sebagai kekuatan pemersatu umat dan bangsa.

kehilangan prinsip akidah. Bahkan ketika mengalami penolakan, penghinaan, dan kekerasan, Rasulullah SAW tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran dan doa.

Sejarah Islam membuktikan bahwa dakwah berkembang bukan karena paksaan, tetapi karena keteladanan. Kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial menjadi media dakwah yang paling efektif.

Dakwah yang menyentuh hati lahir dari akhlak, bukan dari kemarahan; dari keteladanan, bukan dari kebencian.

Dalam konteks inilah inklusivitas dakwah menemukan maknanya: membuka ruang dialog, membangun kepercayaan sosial, dan menghadirkan Islam sebagai solusi atas problem kemanusiaan.

Selektivitas dalam Tarbiyah dan Inklusivitas dalam Dakwah

Penting untuk ditegaskan bahwa inklusivitas dakwah tidak menafikan prinsip selektif dalam pembinaan kader dan struktur. Di sinilah sering terjadi kesalahpahaman. Selektif dalam tarbiyah adalah keharusan manhajiy, bukan sikap eksklusif.

Selektivitas diperlukan untuk menjaga kualitas, kedalaman, dan kesinambungan pembinaan. Ia bertujuan membentuk kader yang beriman kokoh, berakhlak mulia, dan berkomitmen tinggi terhadap perjuangan. Selektif bukan berarti menutup diri dari masyarakat, bukan pula membangun tembok pemisah antara “kami” dan “mereka”.

Sebaliknya, inklusivitas adalah sikap dakwah dalam ruang publik. Dakwah bersifat terbuka, merangkul, dan komunikatif. Rasulullah SAW membina para sahabat secara bertahap dan selektif sesuai kesiapan iman dan komitmen mereka, namun pada saat yang sama membuka pintu dakwah seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat.

Beliau hadir di pasar, berdialog dengan berbagai kelompok, dan melayani kaum lemah. Inilah keseimbangan antara pembinaan internal yang disiplin dan dakwah publik yang inklusif.

Dengan demikian, selektivitas tarbiyah dan inklusivitas dakwah bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua prinsip yang berada pada ruang berbeda namun saling melengkapi. Pembinaan internal menuntut kedisiplinan dan komitmen, sedangkan dakwah publik menuntut empati, keterbukaan, dan kebijaksanaan.

KH. Hilmi Aminuddin menegaskan prinsip:
"Jahriyattud dakwah wa sirriyatut tandzim".

Dakwah pada hakekatnya adalah terbuka, sementara struktur organisasi bersifat konfidensial.

Inklusivitas Dakwah dalam Konteks Indonesia

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, inklusivitas dakwah bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga kebutuhan strategis. Tanpa pendekatan inklusif, dakwah berpotensi memicu polarisasi sosial dan konflik horizontal.

Sejarah menunjukkan bahwa Islam hadir dan berkembang di Indonesia melalui jalan damai, budaya, pendidikan, dan keteladanan. Para ulama Nusantara tidak memusuhi realitas sosial, melainkan mengolahnya menjadi sarana dakwah yang efektif dan membumi.

Inklusivitas dakwah juga mengandaikan kesadaran bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tugas seorang da'i adalah menyampaikan dan memberi teladan, bukan menghakimi hasil.

Dakwah yang menghakimi akan menciptakan jarak, sementara dakwah yang memuliakan manusia akan melahirkan kedekatan dan kepercayaan.

Karena itu, kader dakwah dituntut menjadi jembatan, bukan sekat: jembatan antara nilai Islam dan realitas masyarakat, antara idealisme dan kebutuhan riil rakyat, antara iman dan kemanusiaan.

Penutup

Paradigma inklusivitas dakwah menegaskan bahwa dakwah Islam harus tetap kokoh dalam prinsip, namun lentur dalam metode. Prinsip akidah dan nilai tidak dikompromikan, tetapi cara penyampaian disesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan manusia.

Dalam dunia yang semakin kompleks, dakwah yang eksklusif dan kaku justru akan kehilangan relevansi. Sebaliknya, dakwah yang inklusif, berakhlak, dan solutif akan menghadirkan Islam sebagai kekuatan moral yang mempersatukan, membebaskan, dan memuliakan manusia.

Inilah dakwah yang setia pada risalah kenabian dan relevan bagi kehidupan kebangsaan Indonesia hari ini.#



KABAR MPP



MPW JATIM GELAR SKPD

PKS JATIM PERKUAT IDEOLOGI KADER HADAPI DINAMIKA POLITIK NASIONAL

PKS Jawa Timur memperkuat fondasi ideologi kader dan pejabat publiknya untuk merespons dinamika politik yang kian kompleks, mulai dari perdebatan sistem pilkada hingga isu global seperti Palestina dan peran partai dalam pemerintahan.

Langkah tersebut diambil melalui Sosialisasi Konsep Dasar Partai (SKDP) yang digelar Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jatim di Surabaya, Sabtu (1/2/2026).

Ketua MPW PKS Jawa Timur, **Ahmadi**, menyebut SKDP menjadi pegangan moral dan konsepsional bagi pimpinan struktur, kader, serta anggota DPRD Fraksi PKS agar tetap solid dalam menyikapi isu publik yang terus bergerak.

"Peserta SKDP, khususnya pejabat struktur dan anggota dewan, diharapkan semakin matang merespons isu publik dengan berlandaskan kepatuhan pada Konsep Dasar Partai," ujar Ahmadi. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Prime Biz Surabaya ini diikuti 135 peserta.

Materi yang dibahas mencakup AD/ART, Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan PKS, Garis Besar Kebijakan Partai, pengarusutamaan keluarga, wanantara, hingga platform PKS dalam pembangunan nasional. Sejumlah pengurus Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Pusat hadir sebagai narasumber, antara lain Sekretaris MPP PKS **Baran Wirawan**, anggota Komisi SDM, Organisasi dan Kewilayahan MPP **Diah Nurwitasari**, serta **Sri Rahayu** dari Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga MPP.

Baran Wirawan menilai penguatan ideologi menjadi kebutuhan mendesak agar kader dan pejabat publik PKS memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis, baik lokal, nasional, maupun global.

